

**28 TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021**

Tarja Kakanwil 4; Tarja Divmin 4; Tarja Yankum 11; Tarja Pas 6; Tarja Imigrasi 2

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>						
1	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham dengan predikat terdefinisi (Skor 4)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor Wilayah dan UPT</li> <li>Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Tim Satgas SPIP</li> <li>Laporan hasil sosialisasi</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat dan membentuk Tim Satgas SPIP pada Kanwil dan 28 UPT yang dibuktikan dengan SK Tim Satgas SPIP (Januari)</li> <li>Melaksanakan Sosialisasi tingkat maturitas SPIP di Kantor Wilayah dengan mengundang 28 Satker dengan narasumber ITJEN dan BPKP Perwakilan Sumsel (Maret)</li> </ol>
				<p>B09:</p> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP	<p>B09:</p> Surat Tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas	<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat surat perintah monev ke UPT Sumsel</li> <li>Pelaksanaan monev</li> </ol>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				pada satuan kerja oleh Kantor Wilayah	pelaksanaan SPIP pada satuan kerja oleh Kantor Wilayah	ke UPT : - kota Palembang (Juli) - luar kota Palembang (Agustus-September) 3. Membuat Laporan pelaksanaan monev.
				B12: Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja oleh Kantor Wilayah	B12: Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja oleh Kantor Wilayah	B12: Rapat monitoring evaluasi : a. Membuat nota dinas undangan rapat; b. Laporan (dokumentasi, notula, daftar hadir rapat).
		2.Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	B03: Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan <i>Workshop</i>	B03: 1. Laporan Koordinasi dengan BPKP 2. Laporan/Notula Pelaksanaan <i>Workshop</i> MR	B03: 1. Melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan terkait persiapan pendampingan MR (Januari) 2. Melaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Penerapan MR		Workshop penerapan MR dibulan (Maret)
				B06: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B06: Laporan pendampingan penerapan MR	B06: 1. Menetapkan 3 Satker yang akan dilakukan pendampingan (April) 2. Melaksanakan pendampingan ke 3 satker (Juni)
				B09: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B09: Laporan pendampingan penerapan MR	B09: 1. Menetapkan 3 Satker yang akan dilakukan pendampingan (Juli) 2. Melaksanakan pendampingan ke 3 satker (September)
				B12: Evaluasi Penerapan MR	B12: Laporan Evaluasi Penerapan MR	B12: Rapat evaluasi : a. Membuat nota dinas undangan rapat; b. Laporan (dokumentasi,

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						notula, daftar hadir rapat).
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 ke bawah NIHIL	B03: 1. Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B03: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	B03: 1. Merekap temuan hasil pemeriksaan Itjen dan BPK yang belum ditindaklanjuti (Maret) 2. Memverifikasi dan menyampaikan tindak lanjut hasil temuan kepada Itjen (Maret)
				B06: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B06: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	B06: Merekap temuan hasil pemeriksaan Itjen dan BPK yang belum ditindaklanjuti (Juni)
				B09: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B09: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	B09: Merekap temuan hasil pemeriksaan Itjen dan BPK yang belum ditindaklanjuti (September)

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen Laporan Evaluasi	B12: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut; 3. Laporan Evaluasi. 4. Laporan yang menyatakan TLHP Tahun 2018 ke bawah NIHIL	B12: Merekap temuan hasil pemeriksaan Itjen dan BPK yang belum ditindaklanjuti (Desember)
3	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi <i>Corporate University</i>	1. Meningkatnya kapasitas SDM di wilayah	Terlaksananya workshop/sosialisasi/ bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dan UPT	B03: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Administratif Fasilitatif	B03: Laporan	B03: 1. Rapat Persiapan 2. Pembuatan SK 3. Pelaksanaan Kegiatan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Administratif Fasilitatif 4. Laporan Kegiatan <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan Februari 2021)</b>
				B06: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Imigrasi	B06: Laporan	B06: 1. Pelaksanaan Kegiatan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Imigrasi 2. Laporan Kegiatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan Mei 2021)</b>
				B09: Pelaksanaan <i>workshop</i> /sosialisasi/ bimtek Bidang Pemasyarakatan	B09: Laporan	B09: 1. Pelaksanaan Kegiatan <i>workshop</i> /sosialisasi/ bimtek Bidang Pemasyarakatan 2. Laporan Kegiatan
				B12: Pelaksanaan <i>workshop</i> /sosialisasi/ bimtek Bidang Pelayanan Hukum dan HAM	B12: Laporan	B12: 1. Pelaksanaan Kegiatan <i>workshop</i> /sosialisasi/ bimtek Bidang Pelayanan Hukum dan HAM 2. Laporan Kegiatan <b>(Pelaksanaan Kegiatan November 2021)</b>
		2. Tersusunnya <i>Best practice</i> di Kantor Wilayah	4 (empat) <i>Best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate</i>	B06: Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum	B06: 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate</i>	B09: Hasil Pelaksanaan 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			<i>University</i> di Kantor Wilayah	dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	<i>University</i> dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Pemasarakatan dan Imigrasi
				B12: Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	B12: 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	B12: Hasil Pelaksanaan 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM
4	Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)	1. Tersedianya data informasi seluruh pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP 2. Tersusunnya Pedoman Pengisian Sistem Informasi Pelayan Publik (SIPP)	Seluruh data pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput ke dalam portal SIPP	B06: 50% data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput pada portal SIPP	B06: <i>Capture</i> data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP	B06: 1. Membuat surat ke 28 UPT untuk menginput data informasi pelayanan publik dan menyampaikan <i>Capture</i> data aplikasi sebanyak 50% (April); 2. Membuat laporan SIPP dan melampirkan hasil <i>capture</i> aplikasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						SIPP (Mei)
				B12: 100% data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput pada portal SIPP	B12: <i>Capture</i> data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP	B12: 1. Membuat surat ke 28 UPT untuk menginput data informasi pelayanan publik dan menyampaikan Capture data aplikasi sebanyak 100% (Oktober); 2. Membuat laporan SIPP dan melampirkan hasil capture aplikasi SIPP (November)
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>						
5	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi	Indeks RB minimal Sangat Baik (>78-90)	1. Terpetakannya jumlah agen perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2. Implementasi Area Perubahan Reformasi Birokrasi	B03: 1. Pencanaan dan penandatanganan Zona Integritas di wilayah dan UPT 2. Pemetaan jumlah agen perubahan	B03: 1. Laporan Pencanaan Zona Integritas 2. Peta jumlah agen perubahan	B03: 1. Membuat surat pemberitahuan pelaksanaan pencangangan dan penandatanganan pembangunan ZI ke seluruh UPT dan



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>membentuk/membuat SK agen perubahan (Januari).</p> <p>2. Pelaksanaan Pencanangan pembangunan dan Penandatanganan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kanwil dan 28 UPT (Januari)</p> <p>3. UPT menyampaikan Laporan pencanangan ZI dan SK Agen Perubahan (dokumentasi) (Februari).</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Pendampingan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM</p> <p>2. Penguatan Reformasi Birokrasi di UPT</p>	<p>B06:</p> <p>Laporan</p>	<p>B06:</p> <p>1. Membuat surat perintah kepada Tim Zona Integritas di Kanwil untuk melakukan pendampingan dan penguatan ke UPT</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Sumsel (April)</p> <p>2. Pelaksanaan pendampingan dan penguatan ke UPT : - kota Palembang (April) - luar kota Palembang (Juni)</p> <p>3. Membuat Laporan pendampingan ZI dan penguatan RB pada UPT (Juni)</p>
				B09: Pendampingan PMPRB	B09: Laporan	<p>B09: 1. membuat surat permohonan pendampingan ke Itjen (Juli) 2. membuat laporan hasil pendampingan PMPRB (dokumentasi, notula, daftar hadir) (September)</p>
6	Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib	<ol style="list-style-type: none"> <li>Digitalisasi Arsip</li> <li>Dimusnahkannya Data Arsip Inaktif yang sudah memasuki masa retensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdigitalisasinya Arsip di Wilayah</li> <li>Terpublikasinya arsip digital yang dapat diakses publik sesuai dengan</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20% Arsip terdigitalisasi</li> <li>Publikasi Arsip Digital</li> <li>Mendata Data</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Tim</li> <li>Daftar Arsip Digital</li> <li>Data Arsip inaktif yang sudah memasuki masa</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Persiapan digitalisasi arsip (Januari)</li> <li>Pembuatan SK Tim Digitalisasi Arsip</li> </ol>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		Keamanan Klasifikasi dan Hak Akses Arsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 56 Tahun 2016 3. Seluruh Data Arsip Inaktif yang sudah memasuki masa retensi dimusnahkan	Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi ke Biro Umum untuk diusulkan dimusnahkan	retensi	(Januari) 3. Menyiapkan server tempat penyimpanan arsip digital (Februari) 4. Pemilahan arsip yang akan digitalisasi serta pembuatan folder arsip sesuai dengan klasifikasi arsip (Inventarisasi) (Februari) 5. Pelaksanaan digitalisasi arsip dengan membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Digital Kepegawaian (Maret) <i>Target 300 arsip</i> 6. Pemilahan (Inventarisasi) arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (Permenkumham Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>peraturan Menkumham RI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kemenkumham) (Maret)</p> <p>7. Pelaksanaan Pembuatan Daftar Arsip Inaktif Kepegawaian yang sudah memasuki masa retensi (Maret)</p>
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>50% Arsip terdigitalisasi</li> <li>Publikasi Arsip Digital</li> <li>Mengirimkan surat usulan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya kepada Setjen Cq</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar Arsip Digital</li> <li>Data Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi</li> <li>Surat usulan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya kepada Setjen Cq</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan digitalisasi arsip dengan membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Digital Kepegawaian (Mei) <i>Target 700 arsip</i></li> <li>Pelaksanaan Pembuatan Daftar</li> </ol>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Biro Umum	Biro Umum	<p>Arsip Inaktif Kepegawaian yang sudah memasuki masa retensi (Mei)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rapat persiapan pemusnahan arsip (Mei).</li> <li>4. Pembuatan SK Tim Pemusnahan Arsip (Mei)</li> <li>5. Mendata arsip yang akan dimusnahkan (Juni)</li> <li>6. Memindahkan dan menata arsip yang akan dimusnahkan (Juni)</li> <li>7. Membuat Daftar Arsip usul musnah berdasarkan Daftar arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi Target 500 arsip (Juni)</li> <li>8. Membuat dan Mengirimkan Surat usulan pemusnahan arsip kepegawaian</li> </ol>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>Kepada Setjen Cq Biro Umum (Juni)</p> <p>B09:  1. 100% Arsip terdigitalisasi  2. Publikasi Arsip Digital  3. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang sudah disetujui oleh Kepala ANRI</p>
					<p>B09:  Daftar Arsip Digital  Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip</p>	<p>B09:  1. Pelaksanaan digitalisasi arsip dengan membuat Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Arsip Digital Kepegawaian (Agustus) <i>Target 1000 arsip</i>  2. Menerima surat balasan dari Setjen disertai Surat persetujuan dari ANRI terkait Daftar arsip usul musnah (Agustus)  3. Persiapan pemusnahan arsip (Agustus)  4. Membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip (September)  5. Pelaksanaan pemusnahan arsip (September)  6. Dokumentasi (September)</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						7. Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip (September)
				B12: Pelaksanaan pemusnahan arsip yang sudah disetujui oleh Kepala ANRI	B12: Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip	B12: 1. Berita acara pemusnahan arsip (Desember) 2. Dokumentasi (Desember) 3. Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip (Desember)
7	Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid 19	Tetap sehat di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	B03: Inventarisasi jumlah pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 dan Sosialisasi protokol kesehatan	B03: 1. Data pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 2. Laporan pelaksanaan kegiatan	B03: 1. Tes Covid-19 (Rapid Test) (Februari) 2. Penerapan Kebiasaan Baru (Februari)
				B06: Monitoring penerapan protokol kesehatan di Kanwil	B.06 Laporan monitoring	B06: 1. Membuat surat perintah kepada Tim Monev Penerapan Protokol Kesehatan (April)

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Pelaksanaan Monev ke UPT Kota Palembang (Mei) 3. Monev luar kota (Juni) 4. Laporan Monev (Juni)
				B0:9 Monitoring penerapan protokol kesehatan di Kantor Wilayah	B.09 Laporan monitoring	B09: 1. Menginventarisir pegawai yang terpapar Covid-19 (September) 2. Laporan monitoring (September)
				B12: Evaluasi dan Laporan	B.12 Laporan	B12: 1. Menginventarisir pegawai yang terpapar Covid-19 (November) 2. Laporan evaluasi (Desember)
8	Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui SIPaSTIKU	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	B03: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B03: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	B03: 1. Inventarisir Rencana Pengadaan Barang/Jasa Kanwil dan UPT (Januari).



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyurati seluruh Satker agar melaporkan progres PBJ kepada Kantor Wilayah (Maret)</li> <li>3. Melaporkan Progress Pengadaan barang/Jasa Kanwil dan UPT melalui Aplikasi Sipastiku. (Maret)</li> </ol>
				B06: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B06: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	B06: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Kegiatan Penguatan PBJ (April)</li> <li>2. Menyurati seluruh Satker agar melaporkan progres PBJ kepada Kantor Wilayah (Juni)</li> <li>3. Melaporkan Progress Pengadaan barang/Jasa Kanwil dan UPT melalui Aplikasi</li> </ol>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						Sipastiku. (Juni)
				B09: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B09: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	B09: 1. Menyurati seluruh Satker agar melaporkan progres PBJ kepada Kantor Wilayah (September) 2. Memonitor dan Melaporkan Progress PBJ di seluruh Satker melalui Aplikasi Sipastiku (September)
				B12: Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B12: <i>Screenshot</i> laporan Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	B12: 1. Menyurati seluruh Satker agar melaporkan pelaksanaan PBJ kepada Kantor Wilayah (November) 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan PBJ

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						TA 2021 Kanwil dan UPT melalui Aplikasi Sipastiku (Desember)
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>						
9	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan	B03: Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	B03: Laporan Koordinasi dengan melampirkan: 1. SK Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Program Pembentukan Peraturan Daerah Prov/Kab/Kota)	B03: 1. Membuat SK Panitia Kegiatan Koordinasi 2. Membuat dan mengirimkan surat koordinasi ke Pemerintah daerah 3. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
				B06: Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah	B06: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah prakarsa	B06: 1. Tim Pokja melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi terhadap Raperda Prakasa Pemerintah Daerah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Pemerintah Daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	2. Menyusun laporan hasil fasilitasi harmonisasi terhadap Raperda
				B09: Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundangundangan Kantor Wilayah	B09: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	B09: 1. Tim Pokja melaksanakan rapat fasilitasi harmonisasi terhadap Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah 2. Menyusun laporan hasil fasilitasi harmonisasi terhadap Raperda
				B12: Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal	B12: Laporan pengharmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	B12: 1. Menyusun laporan tahunan 2. Menyampaikan laporan kepada Dirjen PP

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Peraturan Perundang-undangan		
10	Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi	1. Terciptanya pemahaman pelaku usaha / korporasi terkait kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di wilayah	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di wilayah	B03: Koordinasi awal untuk pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah	B03 1. Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Matrik data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah (data awal tahun)	B03: 5. Rapat Persiapan 6. Koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Unit Eselon I 7. Penyusunan Pemetaan data Pemilik Manfaat di kabupaten / kota  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret 2021)</b>
				B06: Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode I	B06: Laporan diseminasi periode I (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan)	B06: 1. Pembuatan SK 2. Rapat Tim 3. Pelaksanaan kegiatan Diseminasi Kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode I 4. Laporan Kegiatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan April-Juni 2021)</b>
				B09: Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode II	B09: Laporan diseminasi periode II (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan)	B09: 1. Pembuatan SK 2. Rapat Tim 3. Pelaksanaan kegiatan Diseminasi Kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode II 4. Laporan Kegiatan <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli-Agustus 2021)</b>
				B12: Evaluasi atas pelaksanaan diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat	B12: 1. Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan) 2. Matrik data pelaporan Pemilik	B12: 1. Inventarisir wilayah kabupaten / kota yang belum menerapkan kebijakan pelaporan pemilik manfaat 2. Laporan Evaluasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
					Manfaat di wilayah (data akhir tahun)	<b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021)</b>
		2. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	B03: Koordinasi awal untuk pemetaan pengawasan terkait penerapan PMPJ di wilayah	B03: Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, tabel pemetaan, dokumentasi foto)	B03: 1. Rapat Persiapan 2. Koordinasi dengan Stakeholder terkait dan Unit Eselon I 3. Penyusunan Pemetaan Pengawasan terkait penerapan PMPJ di kabupaten / kota <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Maret 2021)</b>
				B06: Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode I	B06 Laporan hasil pengawasan periode I (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	B06: 1. Pembuatan Surat Perintah 2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode I 3. Laporan Kegiatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei – Juni 2021)</b>
				B09: Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode II	B09 Laporan hasil pengawasan periode II (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	B09: 1. Pembuatan Surat Perintah 2. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode II 3. Laporan Kegiatan  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli- Agustus 2021)</b>
				B12: Evaluasi atas pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah	B12: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	B12: 1. Inventarisir wilayah kabupaten / kota yang belum menerapkan PMPJ 2. Laporan Evaluasi  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021)</b>



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
11	Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah	Terciptanya pemahaman masyarakat di wilayah tentang pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	Tercapainya implementasi layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah	<p>B06: Koordinasi awal terkait peran kanwil dalam memperkenalkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah berdasarkan PP mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria Untuk UMK</p> <p>B09: Pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK</p>	<p>B06: Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p> <p>B09: Laporan pelaksanaan webinar (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)</p>	<p>B06: 1. Rapat Persiapan 2. Surat Perintah 3. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam memperkenalkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah 4. Laporan Kegiatan</p> <p><b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Mei – Juni 2021)</b></p> <p>B09: 1. Pembuatan SK 2. Rapat Tim 3. Pelaksanaan Webinar mengenai layanan pendaftaran Perseoran Perorangan di Wilayah 4. Laporan Kegiatan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli-September 2021)</b>
				B12: Evaluasi atas pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	B12: 1. Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Matrik jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah	B12: 1. Inventarisir permasalahan pemahaman masyarakat mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan di Wilayah 2. Laporan Evaluasi <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021)</b>
12	Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah	Optimalisasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah	1. Terlaksananya Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah	B03: Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan KI daerah	B03: Laporan Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan KI daerah	B03: 1.Rapat Persiapan 2.Inventarisasi <i>Stakeholders</i> yang akan melaksanakan Kerjasama dgn Kanwil <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan</b>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>Februari – Maret 2021)</b>
				B06: Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah KI daerah	B06: Laporan Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah KI daerah	B06: 1.Pembuatan SK 2. Rapat Tim 3.Pelaksanaan kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Pemerintah provinsi/Kabupaten / Kota dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta berupa sosialisasi/diseminasi 4. Laporan Kegiatan  <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan April-Juni 2021)</b>
				B09: Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan	B09: Laporan Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan	B09: 1. Pembuatan SK 2. Rapat Tim 3. Diseminasi/Sosialisasi ttg Paten dan KI

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah Paten dan KI daerah	Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah Paten dan KI daerah	dgn Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah 4. Laporan Kegiatan  <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan Juli-September 2021)</b>
				B12: Rencana Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual Kanwil dengan Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya untuk tahun 2022	B12: Laporan Rencana Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual Kanwil dengan Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya untuk tahun 2021	B12: 1. Inventarisir Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya yang belum melakukan implementasi kerjasama 2. Menyusun Rencana implementasi kerjasama KI  <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan November 2021)</b>
			2. Terlaksananya Implementasi Kerjasama KI untuk	B03: Koordinasi dengan Pusat untuk	B03: Laporan Koordinasi dengan Pusat untuk	B03: 1.Pembuatan Srt Perintah Koordinasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			meningkatkan Permohonan Pendaftaran IG dan Desain Industri	Menyusun Permohonan IG	Menyusun Permohonan IG	2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi  <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret 2021)</b>
				B06: Koordinasi dengan Pemda dan atau MPIG untuk Menyusun Permohonan Ig	B06: Laporan Koordinasi dengan Pemda dan atau MPIG untuk Menyusun Permohonan Ig	B06: 1. Srt Perintah koordinasi dgn Pemda/MPIG 2. Laporan Pelaksanaan koordinasi  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan April-Juni 2021)</b>
				B09: Penyusunan Draft Permohonan IG	B09: Draft Permohonan IG	B09: Penyusunan Draf Permohonan IG  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli-September 2021)</b>
				B12: Permohonan IG dan Desain Industri	B12: Bukti Permohonan IG dan Desain Industri	B12: 1. Pendaftaran IG Dan Desain Industri

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						2. Bukti Permohonan IG dan Desain Industri.  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021)</b>
13	Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah	Optimalisasi Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terlaksananya Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah	B03: Koordinasi dengan APH untuk pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI	B03: 1. Laporan Koordinasi dengan APH 2. Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	B03: 1. Pembuatan Srt Perintah Koordinasi 2. Koordinasi dgn Aparat Penegak Hukum 3. Penyusunan data Pelanggaran KI 4. Laporan Koordinasi  <b>(Pelaksanaan Kegiatan Bulan Maret 2021)</b>
				B06: Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI dengan APH sesuai dengan target stakeholder pada Perjanjian Kinerja	B06: 1.Laporan Kegiatan Pencegahan 2.Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	B06: 1. SK Tim 2. Rapat Persiapan 3. Melaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Pencegahan Pelanggaran KI 4. Laporan Kegiatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan April-Juni 2021)</b>
				B09: Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI dengan APH sesuai dengan target stakeholder pada Perjanjian Kinerja	B09: 1.Laporan Kegiatan Pencegahan 2.Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	B09: 1. SK Tim 2. Rapat Persiapan 3. Melaksanakan Sosialisasi/Diseminasi Pencegahan Pelanggaran KI 4. Laporan Kegiatan  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan Juli-September 2021)</b>
				B12: Rencana Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI tahun 2022	B12: 1.Laporan Kegiatan Pencegahan 2.Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	B12: 1. Laporan dan Evaluasi kegiatan Pencegahan KI 2. Update Data Pelanggaran KI  <b>(Pelaksanaan Kegiatan bulan November 2021)</b>
14	Mendorong	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	B03:	B03:	B03:

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2020 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2020 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	1. Melaksanakan rapat kerja terkait evaluasi pelaksanaan aksi ham pada bulan february minggu ke-1 2. membuat surat notifikasi ke kab/kota terkait pelaksanaan aksi ham bulan Januari minggu ke-4
				B06: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	B06: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B04 tahun 2021 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	B06: 1. pelaksanaan rapat kerja aksi ham B04 di bulan Juni minggu ke-1 2. membuat surat notifikasi ke kab/kota terkait pelaksanaan aksi ham bulan Maret minggu ke-2
				B09: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan	B09: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi	B09: 1. pelaksanaan rapat kerja aksi ham B08



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota</p>	<p>HAM B08 tahun 2021</p> <p>2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota</p>	<p>di bulan September minggu ke-4</p> <p>2. membuat surat notifikasi ke kab/kota terkait pelaksanaan aksi ham bulan Agustus minggu ke-1</p>
				<p>B12:</p> <p>1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota</p>	<p>B12:</p> <p>1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B12 tahun 2021</p> <p>2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota</p>	<p>B12:</p> <p>1. pelaksanaan rapat kerja aksi ham B12 di bulan Desember minggu ke-2</p> <p>2. membuat surat notifikasi ke kab/kota terkait pelaksanaan aksi ham bulan Nopember minggu ke-1</p>
15	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	B03: Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan	B03: Laporan hasil pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah	B03: Melakukan inventarisir dan pemetaan terhadap 17 kabupaten/kota yang telah dan belum melaksanakan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan sama sekali)	Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan sama sekali)	kabipaten/kota peduli ham di bulan Maret minggu ke 3
				B06: 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	B06: Surat notifikasi Berita acara pemeriksaan	B06: 1. Membuat notifikasi kepada seluruh kab/kota terkait pelaksanaan kab/kota peduli ham di bulan April Minggu ke2 2. Melakukan verifikasi data kriteria kabupaten / kota peduli HAM di bulan Agustus minggu 1 Melakukan penginputan ke aplikasi kriteria kabupaten/kota peduli HAM di bulan September
				B09: 1. Pemeriksaan data	B09: Berita acara	B09: 1. Melakukan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM</p> <p>2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM</p>	pemeriksaan	<p>verifikasi data kriteria kabupaten / kota peduli HAM di bulan September</p> <p>2. Melakukan penginputan ke aplikasi kriteria kabupaten/kota peduli HAM di bulan September</p>
				<p>B12:</p> <p>1. Notifikasi hasil penilaian kriteria kabupaten kota Peduli HAM</p> <p>2. Evaluasi pelaporan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM</p>	<p>B12:</p> <p>1. Surat notifikasi</p> <p>2. Laporan Evaluasi</p>	<p>B12:</p> <p>1. Membuat surat notifikasi hasil penilaian kriteria kabupaten/kota peduli HAM</p> <p>2. Membuat Laporan</p>
16	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja	Tersusunnya rekomendasi terhadap status produk hukum daerah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja	Tersusunnya laporan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta	B03: Mengikuti bimbingan teknis analisis dan evaluasi produk hukum daerah melalui daring yang	B03: Bukti kehadiran mengikuti bimbingan teknis analisis dan evaluasi produk hukum daerah	B03: Mengikuti Bimtek Analisis dan Evaluasi Hukum produk hukum daerah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		baik perubahan, penggantian, pencabutan dan/atau pengintegrasian/simplifikasi berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	diselenggarakan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		
				B06: 1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi 2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (BPHN)	B06: 1. Daftar produk hukum daerah hasil inventarisasi 2. Pengisian dokumen (matrik) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	B06: 1. Menginventarisir produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah 2. Menyusun Matriks hasil analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah
				B09: 1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum	B09: 1. Daftar produk hukum daerah hasil inventarisasi	B09: 1. Menginventarisir produk hukum daerah yang

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi 2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (BPHN)	2. Pengisian dokumen (matrik) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	menjadi objek analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah 2. Menyusun Matriks hasil analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah
				B12: Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN	B12: Laporan akhir sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan yang berisi dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah	B12: Menyusun Laporan kegiatan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah
17	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	Terpenuhinya Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) secara Kuantitas dan kualitas	Meningkatnya Jumlah Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) yang didaftarkan oleh calon Pemberi	B03: Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi	B03: 1. Laporan Kegiatan Diseminasi 2. SK Tim Pokja Daerah Verifikasi	B03: 1. - Melakukan Rapat Persiapan - Melakukan Inventarisasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			Bantuan Hukum	Bantuan Hukum, serta Penunjukkan Pokja Daerah	dan Akreditasi	Calon Pemberi Bantuan Hukum - Melakukan Rapat/Diseminasi 2. - Membentuk Tim Pokja
				B06: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru)	B06: Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	B06: - Melaksanakan Kegiatan Verifikasi - Melaksanakan Rapat Penyusunan Rekomendasi
				B09: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	B09: Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	B09: - Melaksanakan Kegiatan Verifikasi - Melaksanakan Rapat Penyusunan Rekomendasi
18	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	Rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian/analisis data sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	B03: 1. Tersusunnya SK Tim Kajian/Analisis Kebijakan 2. Tersusunnya proposal Kajian/Analisis Kebijakan 3. Terlaksananya presentasi proposal 4. Pengolahan data	B03: 1. SK Tim 2. Proposal Kajian/Analisis Kebijakan 3. Bahan presentasi proposal (format power point), Surat Undangan, Notula, Daftar Hadir dan Foto dokumentasi	B03: 1. Membuat SK Tim Kajian IPK-IKM/Analisis Kebijakan (Januari minggu ke-2) 2. Membuat Surat Usulan dan Proposal Kajian IPK-IKM/Analisis Kebijakan (Februari

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah		dan evaluasi hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A	kegiatan presentasi proposal kajian/ Analisis Kebijakan 4. Data hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan I	minggu ke-1) 3. Menyiapkan Bahan Presentasi Proposal berupa format power point, Surat Undangan, Notula, Daftar Hadir dan Foto dokumentasi kegiatan presentasi proposal kajian IPK-IKM/Analisis Kebijakan (Maret minggu ke-1) 4. Menyiapkan Data hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan I (Maret minggu ke-3)
				B06: 1. <i>Update</i>	B06: 1. Data hasil Survei	B06: 1. Menyiapkan Data

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>pengolahan data dan evaluasi hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A</p> <p>2. Pelaksanaan verifikasi ke lapangan</p> <p>3. Pengolahan dan analisa data rekomendasi verifikasi lapangan</p>	<p><i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan II</p> <p>2. Hasil verifikasi lapangan</p> <p>3. <i>Draft</i> laporan akhir hasil verifikasi</p>	<p>hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan II (April minggu ke-1)</p> <p>2. Mengelola Hasil verifikasi lapangan (April minggu ke-4)</p> <p>3. Menyiapkan <i>Draft</i> Laporan akhir hasil verifikasi (Mei minggu ke-2)</p>
				<p>B09:</p> <p>1. Presentasi <i>draft</i> laporan akhir dengan mengundang <i>stakeholders</i>.</p> <p>2. Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada</p>	<p>B09:</p> <p>1. Bahan presentasi <i>draft</i> laporan akhir, Surat Undangan, Notula, Daftar hadir, dan foto dokumentasi presentasi <i>draft</i> laporan akhir yang mengundang</p>	<p>B09:</p> <p>1. Menyiapkan Bahan Presentasi <i>draft</i> laporan akhir berupa Surat Undangan, Notula, Daftar Hadir dan Foto dokumentasi presentasi <i>draft</i> laporan akhir yang</p>



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kantor Wilayah</p> <p>3. Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian</p>	<p><i>stakeholders</i>;</p> <p>2. Laporan Akhir Kajian</p> <p>3. <i>Capture</i> Bukti Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>e-mail</i>) dan Kepala Kantor Wilayah</p> <p>4. Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjutan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian</p>	<p>mengundang <i>stakeholders</i> (Juli minggu ke-2)</p> <p>2. Menyiapkan Laporan Akhir Kajian (Agustus minggu ke-2)</p> <p>3. Menyiapkan <i>Capture</i> Bukti Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>e-mail</i>) dan Kepala Kantor Wilayah (Agustus minggu ke-4)</p> <p>4. Menyiapkan Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjutan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian (September</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						minggu ke-2)
				B12: Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	B12: Laporan Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	B12: Menyiapkan Laporan Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan (Oktober minggu ke-3)
19	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Termanfaatkannya data SIPKUMHAM dalam menyusun kebijakan di wilayah	Analisis kebijakan dengan memanfaatkan data SIPKUMHAM	B03: 1. Terbitnya SK Tim Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 3. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM	B03: 1. SK Tim Analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 3. <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM	B03: 1. Mengusulkan SK TIM Analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM (Januari minggu ke-3) 2. Menyusun Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM (Februari minggu ke-4) 3. Menyiapkan <i>Capture</i> input laporan pada

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						aplikasi SIPKUMHAM (Maret minggu ke-2)
				B06: 1. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	B06: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM	B06: 1. Menyusun Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM (April minggu ke-2) 2. Menyiapkan <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM (Mei minggu ke-1)
				B09: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM	B09: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM	B09: 1. Menyusun Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM (Juli minggu ke-3) 2. Menyiapkan <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM (Agustus minggu

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 3. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	B12: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan di aplikasi SIPKUMHAM 3. Laporan evaluasi analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	ke-3) B12: 1. Menyusun Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM (Oktober minggu ke-1) 2. Menyiapkan <i>Capture</i> input laporan di aplikasi SIPKUMHAM (Oktober minggu ke-4) 3. Menyusun Laporan evaluasi analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM (November minggu ke-3)
<b>KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN</b>						
20	Penanganan <i>overload</i> Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan	Menurunnya jumlah <i>over load</i> Basan Baran dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data antar institusi penegak	Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif,	B03 1. Perjanjian Kerjasama Penanganan <i>Overload</i> Basan Baran dengan APH	B03 1. Dokumen Perjanjian Kerjasama	B03: 1. Surat Undangan Kerjasama dgn APH 2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
		hukum	efisien pada UPT Rutan dan Rupbasan	terkait		APH
				B06 1. Pelaksanaan pertukaran data overload basan baran berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum 2. Pelaksanaan eksekusi basan baran	B06 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data 2. Laporan Pelaksanaan Eksekusi basan baran	B06: 1. Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Pertukaran Data 2. Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Eksekusi basan baran
				B09 1. Pelaksanaan pertukaran data overstaying tahanan dan basan baran berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hokum 2. Pelaksanaan eksekusi basan baran	B09 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data 2. Laporan Pelaksanaan Eksekusi basan baran	B09: 1. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Pertukaran Data 2. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Eksekusi basan baran

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	B12: Pelaksanaan Monitoring dan Rapat Evaluasi
21	Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat</li> <li>2. Pengembangan lapas produktif sesuai dengan kearifan lokal wilayah masing-masing</li> <li>3. Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah</li> </ol>	B06: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi</li> <li>2. Implementasi Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i></li> <li>3. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol>	B06: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan narapidana yang bersertifikasi</li> <li>2. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i></li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol>	B06: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelatihan Narapidana yang bersertifikasi</li> <li>2. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</li> <li>3. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol>
				B09: 1. Pelaksanaan	B09: 1. Pelatihan	B09: 1. Membuat dan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Implementasi Lapas Produktif 4. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	narapidana yang bersertifikasi 2. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 4. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelatihan Narapidana yang bersertifikasi 2. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 3. Membuat dan Mengirimkan Surat Permintaan Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	B12: Pelaksanaan Monitoring dan Rapat Evaluasi
22	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi sesuai Standar rehabilitasi nasional	Narapidana/ Anak / Klien pecandu narkoba memperoleh Layanan Rehabilitasi Standar rehabilitasi nasional	Terselenggaranya layanan rehabilitasi narkoba Standar rehabilitasi nasional	B03: Mentoring tata kelola penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	B03: Laporan pelaksanaan Mentoring	B03 : 1. Membentuk SK TIM Mentor Rehabilitasi di Wilayah 2. Melakukan koordinasi dengan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						BNNP terkait pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lapas/Rutan
				B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	B06: Laporan supervisi	B06 : 1. Melakukan supervisi penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika 2. Membuat laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di wilayah
				B09: Supervisi teknis layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan di UPT Pemasarakatan	B09: Laporan supervisi	B09 : 1. Melakukan supervisi penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika 2. Membuat laporan supervisi manajemen penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						wilayah
				B12: Evaluasi penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	B12: Laporan Evaluasi penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Pemasarakatan	B12: Membuat laporan evaluasi penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika di UPT
23	Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Optimalisasi fungsi kelompok masyarakat (Pokmas)	Terlaksananya fungsi Pokmas melalui	B03: 1.Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2.Penyusunan Rencana Kerja Pokmas 3.Implementasi Rencana Kerja Pokmas	B03: 1.Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2.Penyusunan Rencana Kerja Pokmas 3.Implementasi Rencana Kerja Pokmas	B03: 1. Membuat SK TIM Sosialisasi Pedoma Kerja Pokmas 2. Menyusun Rencana Kerja Pokmas Oleh TIM Kerja 3. Pelaksanaan Rencana Kerja Pokmas serta Laporan Pelaksanaan Kerja Pokmas
				B12: Monev Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui pemberdayaan Pokmas	B12: Laporan Monev	B12: Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui pemberdayaan Pokmas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
24	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan	1. Meningkatnya Koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	Seluruh Lapas dan Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	<p>B03</p> <p>1. Melakukan koordinasi pengamanan dengan POLDA, KODAM ,BNNP, BIN Daerah dan Perwakilan OMBUDSMAN</p> <p>2. Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang pengawasan, pelatihan, pengamanan dan pertukaran informasi dengan POLDA, KODAM, BNNP, BIN Daerah dan Perwakilan OMBUDSMAN</p>	<p>B03:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait</p> <p>2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)</p> <p>3. Dokumen pertukaran informasi dan data</p>	<p>B03:</p> <p>1. Membuat dan Mengirimkan Surat Koordinasi Pengamanan dengan Instansi Terkait Ditingkat Wilayah (Polda,Kodam,Kejati,BNNP)</p> <p>2. Membuat dan mengirimkan surat ke seluruh UPT Pemasarakatan di Sumatera Selatan untuk melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait</p> <p>3. Membuat laporan pelaksanaan koordinasi</p>
				<p>B06:</p> <p>1. Konsultasi Teknis di Bidang Keamanan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal</p>	<p>B06:</p> <p>1. Laporan Konsultasi Teknis</p> <p>2. Laporan Pelatihan Kesamaptaan</p> <p>3. Laporan Pengawasan dan</p>	<p>B06:</p> <p>1. SK TIM Konstek Bidang Keamanan</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Konstek Bidang Keamanan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Pemasarakatan 2. Menyelenggarakan pelatihan di bidang Kesamaptaan bagi 30 orang petugas pemsarakatan 3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pengawalan dan pengamanan bagi 30 orang petugas pemsarakatan 4. Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data	Pengamanan 4. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data	3. SK Panitia serta Peserta Kesamaptaan 4. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Kesamaptaan 5. SK Panitia serta Peserta Pelatihan Bidang Pengawalan 6. Laporan Pelaksanaan Pengawalan dan Pengamanan 7. Membuat dan Mengirimkan surat kepada UPT Pemsarakatan di Wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang,

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pertukaran informasi dan data</p> <p>8. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, pengeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p>
				<p>B09: Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, pengeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p>	<p>B09: Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, pengeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p>	<p>B09: 1. Membuat dan Mengirimkan surat kepada UPT Masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, pengeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang,</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pertukaran informasi dan data</p> <p>2. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p>
				<p>B12:</p> <p>1. Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p> <p>2. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>B12:</p> <p>1. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p> <p>2. Laporan monev</p>	<p>B12:</p> <p>1. Membuat dan Mengirimkan surat kepada UPT Masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang,</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						<p>pertukaran informasi dan data</p> <p>2. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data</p> <p>3. Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi</p>
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar	Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban	<p>B03</p> <p>1. Konsultasi Teknis Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>2. inventarisir laporan hasil deteksi dini dari Lapas dan Rutan</p> <p>3. Supervisi terkait pelaksanaan</p>	<p>B03:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan konstek deteksi dini kerawanan gangguan kamtib</p> <p>2. Data inventarisir laporan hasil deteksi dini dari Lapas dan Rutan</p> <p>3. Laporan Supervisi</p>	<p>B03:</p> <p>1. Membuat dan mengirimkan surat permintaan laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib ke Lapas/Rutan</p> <p>2. Merekap dan membuat laporan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				kegiatan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan		pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 3. Melakukan Supervisi Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan 4. Membuat Laporan Supervisi di UPT Pemasarakatan
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	B12: Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Gangguan Kamtib di Lapas/Rutan
		3. Inspeksi mendadak, tes urin bagi petugas dan narapidana/ tahanan/anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas <i>maximum security</i>	Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan /anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas <i>maximum security</i>	B03: : Pelaksanaan inspeksi mendadak	B03: Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA	B03: Membuat dan Mengirimkan Surat Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas/Rutan/LPKA
				B06: 1. Pelaksanaan inspeksi mendadak	B06: 1. Laporan Pelaksanaan	B06: 1. Membuat dan Mengirimkan Surat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				2. Pelaksanaan Tes Urin	Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas/Rutan/LPKA 2. Membuat dan Mengirimkan Surat Laporan Pelaksanaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba
				B09: Pelaksanaan inspeksi mendadak	B09: Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA	B09: Membuat dan Mengirimkan Surat Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas/Rutan/LPKA
				B12: 1. Pelaksanaan Tes Urine 2. Pemindahan Bandar Narkoba 3. Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan	B12: 1. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba 2. Laporan Pemindahan	B12: 1. Membuat dan Mengirimkan Surat Laporan Pelaksanaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas yang Terindikasi menggunakan Narkoba



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				gangguan kamtib	Bandar Narkoba 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	2. Membuat Laporan Pemandangan Bandar Narkoba 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib
		4. Validasi dan akurasi data keamanan	Meningkatkan validitas dan akurasi data keamanan	B03: 1. Sosialisasi pelaksanaan penginputan Fitur Keamanan pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP) 2. Pembentukan Operator Fitur Keamanan pada SDP 3. Pelaksanaan Konsultasi teknis Pelaksanaan Penginputan Dat Fitur Keamanan pada SDP 4. Supervisi	B03: 1. Laporan Sosialisasi 2. SK Pembentukan/ Surat Perintah Pembentukan Operator SDP Fitur Keamanan 3. Laporan Konultasi Teknis (Konstek) 4. Laporan Supervisi (Dokumentasi) input pada Register F, Register H, Manajemen penempatan, perlengkapan pengamana, lalu lintas portir)	B03: 1. SK TIM Sosialisasi 2. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi 3. SK Pembentukan Operator SDP Fitur Keamanan 4. Laporan Pelaksanaan Konsultasi Teknis 5. Melakukan Supervisi Penginputan data Fitur Keamanan SDP UPT Pemasarakatan 6. Laporan Supervisi input pada Register F, Register H, Manajemen

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				pelaksanaan penginputan data Fitur Keamanan SDP di UPT Pemasarakatan		penempatan, perlengkapan pengamanan, lalu lintas portir)
				B12: Evaluasi pelaksanaan Penginputan Data Fitur Keamanan	B12: Laporan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penginputan Data Fitur Keamanan
		5. Lapas dan Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal) sesuai Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan	1. Kedisiplinan Petugas 2. Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U). 3. Pelaksanaan Layanan Kunjungan 4. Pelaksanaan Penjagaan. 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling. 6. Pelaksanaan Pengawasan. 7. Pelaksanaan	B03: 1. Penetapan pembentukan Satuan Operasional Kepatuhan Internal UPT Pemasarakatan 2. Pengukuhan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Wilayah 3. Pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	B03: 1. Surat Keputusan Tim satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal ) 2. Laporan Pelaksanaan Pengukuhan 3. Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	B03: 1. Memperbaharui SK Tim Satopspatnal Tahun 2021 2. Mengukuhkan Tim Satops Patnal Kantor Wilayah Oleh Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan 3. Membuat Surat permintaan laporan pelaksanaan tugas Satopspatnal di Wilayah Sumatera Selatan
				B12: 1. Pelaksanaan	B12: 1. Laporan Hasil	B12: 1. Membuat Surat

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
			Penempatan Narapidana/tahanan/ Anak Dalam Kamar Hunian. 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 9. Layanan Registrasi dan Integrasi. 10. Tertib Administasi dan keuangan	kegiatan Satopspatnal Wilayah 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Workshop satopspatnal	pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah 2. Laporan Monev	permintaan laporan pelaksanaan tugas Satopspatnal di Wilayah Sumatera Selatan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satopspatnal
25	Penerapan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) pada Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Bapas dan LPKA <i>Pilot Project</i>	Pelaksanaan pertukaran data berbasis Teknologi Informasi dengan antar institusi penegak hukum melalui SPPT-TI	Terlaksananya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Bapas, LPKA Pilot Project	B03: Penyampaian SK Penetapan UPT Bapas LPKA Target Implementasi	B03: Laporan Penyampaian SK Penetapan UPT Bapas LPKA target Implementasi	B03: 1. Membuat SK Penetapan UPT Bapas, LPKA di Wilayah Sumatera Selatan 2. Laporan Penyampaian SK Penetapan UPT Bapas LPKA di Wilayah Sumatera Selatan
				B06: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi	B06: 1. Laporan hasil monitoring; 2. Laporan Bimtek 3. Laporan Rapat	B06: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI	koordinasi	TI di Wilayah Sumatera Selatan 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Menyampaikan Surat Undangan Antar Institusi Penegak Hukum Terkait Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPTTI Bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI
				B09: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Pelaksanaan	B09: 1. Laporan hasil monitoring; 2. Laporan Bimtek 3. Laporan Rapat koordinasi	B09: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimtek Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Undangan Kegiatan Rapat Koordinasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI		dan Evaluasi 4. Pelaksanaan Kegiatan Rapat
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	B12: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
<b>KEPALA DIVISI IMIGRASI</b>						
26	Pelayanan <i>Eazy Passport</i>	Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan <i>Eazy Passport</i>	1. Penerbitan paspor di luar Kantor Induk meningkat sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNPB 2. Memberikan pelayanan prima sehingga menimbulkan kesan positif terhadap IMIGRASI	B03: 1. Penyusunan rencana kegiatan 2. Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/ Swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan 3. Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i>	B03: 1. SK Tim 2. Laporan sosialisasi 3. Laporan kegiatan	B03: 1. Bulan Januari Kadiv IM menyurati UPT Imigrasi Utk membuat SK TIM pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan <i>Eazy Paspport</i> 2. Bulan Februari UPT Imigrasi Sosialisasi Ke Intansi pemerintah/swasta/ BUMN, komunitas, sekolah dan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
						perumahan 3. Bulan Maret Divisi IM Memonitoring Pelaksanaan Pelayanan Eazy Paspor
				B06: 1.Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/Swasta /BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan 2.Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i>	B06: 1. Laporan sosialisasi 2. Laporan kegiatan	B06: 1. Bulan April Sosialisasi Ke Instansi Pemerintah/Swasta/ BUMN, Komunitas, Sekolah dan Perumahan  2. Bulan Mey dan Juni Divisi IM memonitoring Pelaksanaan Pelayanan Eazy Paspor
				B09: 1. Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/ Swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan 2. Pelaksanaan	B09: 1. Laporan sosialisasi 2. Laporan kegiatan	B09: 1. Bulan Juli Sosialisasi Ke Intansi pemerintah/ swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan 2. Bulan Agustus dan September

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				<p>elayanan <i>Eazy Passport</i></p> <p>B12: Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>Pelaksanaan Pelayanan <i>Eazy Paspor</i></p> <p>B12: Kadiv Imigrasi melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i></p>
27	Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Kegiatan rapat Timpora Tingkat Provinsi</li> <li>2. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran WNI/ WNA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Gakkum)</li> <li>2. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran WNI/ WNA</li> <li>3. Terlaksananya rapat koordinasi timpora</li> <li>4. Terlaksananya operasi gabungan timpora tingkat Provinsi</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan rapat Timpora Tingkat Provinsi</li> <li>2. Terlaksananya operasi gabungan Timpora WNA pada UPT</li> </ol> <p>B06: Terlaksananya operasi gabungan</p>	<p>B03: Laporan dan pemetaan WNA</p> <p>B06: Laporan Dokumentasi</p>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bulan Januari Divisi Keimigrasian membuat SK Tim Pora,</li> <li>2. Bulan Februari Menyurati UPT untuk melakukan operasi gabungan Timpora WNA</li> <li>3. Bulan Maret minggu ke tiga Divisi Im melaksanakan rapat Tim PORA Tingkat Provinsi</li> </ol> <p>B06: Bulan Juni Divisi menyurati UPT</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	ACTION PLAN KANWIL
				Timpora WNA pada UPT		untuk melaksanakan operasi gabungan Timpora WNA
				B09 : Operasi gabungan Timpora tingkat Provinsi	B09: Laporan Dokumentasi	B09: Bulan September Divisi Imigrasi melakukan Operasi gabungan Timpora tingkat Provinsi
				B12: 1.Evaluasi Penyelidikan terhadap WNA/ WNI 2.Tersajinnya laporan dan evaluasi kegiatan timpora tingkat Provinsi	B09: Laporan Dokumentasi	B12: Bulan November Divisi Imigrasi melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelidikan terhadap WNA/ WNI